

PENANAMAN NILAI-NILAI KEISLAMAMAN MELALUI
KADERISASI PENDIDIKAN POLITIK DI MASYARAKAT KOTA BANDUNGMuhamad Arpan¹, Dadang Mulyana², Cahyono³^{1,2,3}Universitas Pasundan¹mhd.arpan25@gmail.com, ²dadangmulyana@unpas.ac.id, ³cahyono@unpas.ac.id**Abstract**

This study, titled "The Integration of Islamic Values through Political Education Cadre Development in Bandung City", focuses on a case study of the Bandung City Branch Leadership Council (DPD) of the Prosperous Justice Party (PKS). The objectives of this research are to describe the Islamic values applied by DPD PKS in political education, analyze their implementation through cadre development processes, and identify challenges faced along with strategies to address them. This research adopts a qualitative approach using a case study method. The subjects include DPD PKS administrators, cadres, and the community in Bandung City. Data collection was conducted through in-depth interviews with DPD PKS leaders, cadres, and the community, as well as document analysis of relevant records. The findings reveal that DPD PKS Bandung City incorporates Islamic values such as justice, welfare, unity, tolerance, democracy, equality, Islamic brotherhood (ukhuwah Islamiyah), trustworthiness (amanah), deliberation (syuro), good character (akhlaq), and social concern into its political education. These values are implemented through various cadre development activities, including training sessions, discussions, daily political practices, and community-oriented programs such as social assistance and public aspiration channels. Challenges include inconsistencies in applying Islamic values in practical politics and the ever-changing dynamics of the political environment. To overcome these challenges, DPD PKS employs strategies such as strengthening the internalization of Islamic values among cadres, building collaborations with various stakeholders, and conducting periodic evaluations of cadre development programs.

Keywords: Islamic Values, Cadre, Political Education, Political Party, Partai Keadilan Sejahtera, Bandung City.

Article History

Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Penanaman Nilai-Nilai Keislaman Melalui Kaderisasi Pendidikan Politik di Masyarakat Kota Bandung" dengan fokus pada studi kasus di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh DPD PKS dalam konteks pendidikan politik, menganalisis penerapannya melalui proses kaderisasi, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang digunakan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan Pengurus DPD PKS, kader, dan masyarakat Kota Bandung sebagai subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan kader PKS serta masyarakat, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD PKS Kota Bandung mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesejahteraan, persatuan, toleransi, demokrasi, kesetaraan, ukhuwah Islamiyah, amanah, musyawarah, akhlak mulia, dan kepedulian sosial ke dalam pendidikan politik. Nilai-nilai ini diterapkan melalui berbagai kegiatan kaderisasi, termasuk pelatihan, diskusi, praktik politik sehari-hari, serta program-program sosial seperti bantuan kemanusiaan dan penyaluran aspirasi. Tantangan yang dihadapi meliputi ketidakkonsistenan dalam penerapan nilai Islam dalam politik praktis serta dinamika politik yang terus berubah. Untuk mengatasinya, DPD PKS mengadopsi strategi seperti memperkuat internalisasi nilai-nilai Islam di kalangan kader, membangun sinergi dengan berbagai pihak, dan melakukan evaluasi program kaderisasi secara rutin.

Kata kunci: Nilai-Nilai Islam, Kaderisasi, Pendidikan Politik, Partai Politik, Partai Keadilan Sejahtera, Kota Bandung.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki kedaulatan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagaimana diatur dalam hukum dan UUD NRI 1945. Demokrasi Indonesia berpijak pada falsafah bangsa, Pancasila, yang tersurat dalam sila keempat: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Salah satu ciri khas demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat, yang menjadi nilai luhur dalam kehidupan demokrasi. Musyawarah berfungsi sebagai sarana mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang sejalan dengan kepentingan umum, melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan politik.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam demokrasi, termasuk keikutsertaan dalam pemilu untuk menentukan pemimpin yang memiliki visi menciptakan cita-cita bangsa. Pendidikan politik menjadi sarana strategis untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas keterlibatan masyarakat dalam politik. Selain itu, partai politik memiliki peran besar

dalam memberikan pendidikan politik yang baik, sehingga dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya kontribusi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kebijakan negara.

Dalam perspektif Islam, politik (*siyasah*) bertujuan untuk mengatur dan mencapai kemaslahatan masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Al-Mawardi dan Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Politik dalam Islam bukan sekadar kekuasaan, tetapi pengabdian kepada umat yang dilandasi oleh etika dan moral. Etika politik ini relevan dalam membentuk generasi muda agar memahami bahwa politik adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas, bukan sekadar sarana meraih kekuasaan.

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk politik (*muamalah siyasah*), dengan nilai-nilai universal seperti keadilan dan musyawarah. Konsep ini relevan bagi negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, di mana penerapan nilai-nilai Islam dalam politik dapat memperkuat peran masyarakat dan pemerintahan. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kemaslahatan umat, sesuai prinsip *rahmatan lil'alam*, yang menjadikan politik sebagai bagian integral dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan berlandaskan moralitas tinggi.

Pendidikan politik bertujuan tidak hanya untuk memberikan pemahaman konseptual tentang politik tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran warga negara terhadap peristiwa politik di masyarakat dan negara. Partai politik memiliki peran penting dalam melaksanakan pendidikan politik melalui proses kaderisasi, yang mencerminkan nilai, tujuan, dan orientasi masing-masing partai. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, partai politik berfungsi sebagai alat komunikasi politik, sosialisasi, rekrutmen, dan pengatur konflik dalam sistem demokrasi.

Partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan politiknya, termasuk dalam proses pendidikan politik. PKS didirikan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi Indonesia, memprioritaskan isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum, serta beradaptasi dengan dinamika politik modern. Meski menghadapi tantangan dalam integrasi nilai-nilai Islam ke dalam politik modern, partai ini tetap relevan dan memiliki basis dukungan yang kuat, terutama dari masyarakat Muslim perkotaan dan kaum muda.

Di Bandung, penerapan nilai-nilai Islam dalam politik selama lima tahun terakhir menghadapi tantangan seperti pluralisme, radikalisme, politik identitas, dan minimnya pengaruh tokoh agama dalam kebijakan publik. Selain itu, rendahnya kualitas elit politik, termasuk praktik korupsi, turut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam politik. Meski demikian, upaya integrasi nilai-nilai Islam dalam politik tetap penting untuk memperkuat moralitas dan kualitas politik di tengah dinamika yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dirancang untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap objek tertentu yang dianggap sebagai kasus. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2020), metode ini melibatkan analisis terhadap program, kejadian, proses, atau aktivitas tertentu, baik pada individu maupun kelompok, dengan menekankan pemahaman terhadap fenomena spesifik yang terikat oleh waktu dan tempat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Studi kasus dilakukan melalui berbagai sumber data, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, untuk memastikan triangulasi data dan meningkatkan keabsahan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menyelidiki proses penanaman nilai-nilai keislaman melalui kaderisasi pendidikan politik di masyarakat Kota Bandung. Pendekatan ini memberikan peluang untuk memahami hubungan antar faktor yang memengaruhi proses tersebut secara menyeluruh, termasuk jenis nilai Islam yang diterapkan serta metode kaderisasinya, dengan memfokuskan pada pengalaman, perilaku, dan pandangan individu dalam lingkungan alami. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang kaya dan mendalam, seperti cerita pribadi, interaksi sosial, dan pola komunikasi, yang sulit dicapai dengan metode kuantitatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa metode penting untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat, yaitu wawancara, observasi, analisis dokumen, dan triangulasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam dari berbagai narasumber, termasuk kader, pengurus, dan masyarakat sekitar DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung, guna memahami perspektif mereka terkait penanaman nilai-nilai keislaman melalui kaderisasi pendidikan politik. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati lingkungan, pelaku, dan aktivitas yang relevan, menggunakan instrumen tabel pengamatan guna memperoleh data mengenai partisipasi dan perkembangan kaderisasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan arsip, buku, gambar, dan data elektronik yang mendukung penelitian, sementara triangulasi digunakan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti merangkum informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung, dengan fokus pada elemen penting yang relevan dengan tema penelitian untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk narasi, gambar, tabel, atau grafik untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan pola atau hubungan yang ditemukan dalam data, dengan memanfaatkan bukti yang konsisten dan dapat dipercaya. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta didukung oleh referensi yang relevan sebagai bukti yang memperkuat temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Islam yang dikembangkan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dalam Penerapan Pendidikan Politik di Kota Bandung

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung secara konsisten mengembangkan nilai-nilai Islam dalam pendidikan politiknya. Nilai-nilai tersebut meliputi keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan toleransi yang diterapkan dalam berbagai program dan kegiatan. Keadilan diwujudkan melalui program inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, pemberdayaan kelompok kurang terwakili, dan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan partisipasi politik yang adil. Nilai ini mendukung kesetaraan akses dan kesempatan dalam kehidupan politik, sesuai dengan ajaran Islam. Kesejahteraan menjadi fokus utama dengan menekankan perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan kebijakan pemerataan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. PKS juga mengadakan pelatihan serta diskusi untuk meningkatkan pemahaman kader dan masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan sebagai misi sosial.

Persatuan ditekankan untuk menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Program pendidikan politik PKS mempromosikan dialog terbuka, menyelesaikan konflik, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas perbedaan. Acara seperti seminar kebangsaan dan kolaborasi lintas komunitas mendukung terciptanya stabilitas sosial dan politik. Toleransi diajarkan sebagai langkah menciptakan harmoni sosial di tengah perbedaan agama, suku, dan budaya. PKS mengadakan diskusi antaragama dan kegiatan sosial untuk mendorong saling pengertian serta menghormati keragaman. Nilai ini mendukung terciptanya suasana politik yang damai dan inklusif. Pendidikan politik PKS di Kota Bandung menunjukkan sinergi antara ajaran Islam dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai ini untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, rukun, dan harmonis.

Penerapan Nilai-Nilai Keislaman melalui Kaderisasi Pendidikan Politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam yang dikembangkan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung menjadi bagian integral dalam kaderisasi pendidikan politik. Nilai-nilai tersebut meliputi keadilan, kesetaraan, Ukhuwah Islamiyah, amanah, musyawarah, akhlak yang baik, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini ditegaskan dalam setiap program kaderisasi politik yang diselenggarakan. Prinsip-prinsip Islam seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam "Al-Ahkam al-Sultaniyyah" menjadi dasar yang kuat dalam pembentukan pendidikan politik berbasis etika Islam. PKS menempatkan pendidikan politik sebagai medium untuk menanamkan nilai-nilai ini secara masif, memperkuat identitas Islam, dan menjadikannya pijakan dalam setiap pengambilan keputusan.

Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh PKS. Dalam praktiknya, keadilan diwujudkan melalui upaya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu tanpa diskriminasi, sedangkan kesetaraan ditekankan dengan memastikan bahwa semua kader, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan politik yang berkualitas. Kedua nilai ini mendorong para kader untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan etika, keterbukaan, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Selain itu, nilai Ukhuwah Islamiyah diterapkan untuk memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antar kader, menciptakan

harmoni di tengah keberagaman, serta memperkokoh semangat persatuan dalam berbagai program sosial dan politik.

PKS juga menekankan pentingnya amanah dalam dunia politik, di mana setiap kader dididik untuk menjalankan tanggung jawab dengan integritas dan transparansi. Prinsip ini dipandang sebagai bagian dari ibadah, yang mengarahkan kader untuk menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat dan partai. Selain itu, nilai-nilai musyawarah dan akhlak yang baik melengkapi proses kaderisasi, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan dialog yang inklusif dan berlandaskan pada moralitas. Dengan pendekatan ini, PKS Kota Bandung berupaya membangun sistem politik yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kebaikan bersama, menciptakan model pemerintahan Islam yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Kendala yang dihadapi oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dalam Penerapan Nilai-Nilai Keislaman melalui Kaderisasi Pendidikan Politik dan strategi yang diterapkan untuk bisa menangani permasalahan tersebut

Adapun kendala yang dihadapi oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam proses penerapan nilai-nilai keislaman melalui kaderisasi pendidikan politik di masyarakat Kota Bandung, terbagi menjadi dua kategori, yakni kendala internal dan eksternal. Kendala internal mencakup perbedaan pemahaman tentang nilai-nilai Islam di antara kader, dinamika politik yang cepat mengalihkan fokus, keterbatasan sumber daya manusia dan dana, tantangan dalam mengadaptasi teknologi informasi, serta kesulitan dalam menyampaikan nilai-nilai abstrak kepada kader. Sementara itu, kendala eksternal melibatkan stigma negatif masyarakat terhadap partai berbasis agama dan tekanan politik yang dapat mempengaruhi fokus tujuan utama. Dalam menghadapi kendala-kendala ini, DPD PKS Kota Bandung menerapkan berbagai strategi, seperti mengadakan kajian dan diskusi internal, membentuk tim khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi program, menciptakan suasana kondusif untuk berbagi pengalaman, serta melibatkan ustadz dan tokoh agama. Selain itu, strategi eksternal mencakup kolaborasi dengan institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintah, serta membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak untuk mengurangi tekanan politik.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, DPD PKS Kota Bandung juga mengembangkan inovasi dalam teknis dan metodologis. Dalam aspek teknis, mereka memaksimalkan penggunaan platform pembelajaran *online* serta evaluasi dan pemantauan melalui teknologi informasi untuk mempermudah proses kaderisasi pendidikan politik. Metodologinya, DPD PKS menggabungkan metode konvensional dengan pendekatan modern, melibatkan pakar dari berbagai bidang untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi kendala. Indikator keberhasilan yang ditetapkan meliputi perubahan perilaku kader yang lebih mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, kualitas program partai yang berlandaskan nilai-nilai Islam, kesadaran politik kader, solidaritas antar anggota, serta peningkatan kepercayaan masyarakat. Dampak positif yang diharapkan antara lain adalah peningkatan partisipasi kader, kepercayaan masyarakat terhadap partai, dan penguatan hubungan antara partai dengan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait penanaman nilai-nilai keislaman melalui kaderisasi pendidikan politik di masyarakat Kota Bandung, peneliti menyimpulkan bahwa DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung mengembangkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesejahteraan, persatuan, toleransi, dan demokrasi dalam program-program seperti bakti sosial, aspirasi masyarakat, dan advokasi pengambilan *raport* yang tertahan. Nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam kaderisasi pendidikan politik, seperti keadilan, kesetaraan, Ukhuwah Islamiyah, amanah, musyawarah (*syuro*), akhlak yang baik, dan kepedulian sosial, diimplementasikan dalam setiap tahapan kaderisasi, mulai dari *Training* Orientasi Partai hingga Anggota Purna. Kendala yang dihadapi oleh DPD PKS Kota Bandung terbagi menjadi dua kategori, yaitu kendala internal, seperti perbedaan pemahaman nilai-nilai Islam di antara kader, dinamika politik yang cepat mengalihkan fokus, keterbatasan sumber daya manusia dan dana, tantangan adaptasi teknologi informasi, dan kesulitan dalam menyampaikan nilai-nilai abstrak, serta kendala eksternal, seperti stigma negatif masyarakat terhadap partai berbasis agama dan tekanan politik yang mempengaruhi fokus tujuan. Untuk mengatasi kendala ini, DPD PKS Kota Bandung menerapkan strategi seperti mengadakan kajian dan diskusi internal, membentuk tim khusus untuk evaluasi program, menciptakan suasana kondusif untuk berbagi pengalaman, melibatkan ustadz dan tokoh agama, serta kolaborasi dengan institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintah untuk membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Prasetyo & Margi Wahono. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Sejarah dan Kurikulum: *Jurnal Pendidikan dan Kebangsaan*.
- Cahyono, C., Danial, E., Rahmat, R., & Masyitoh, I. (2023). Meningkatkan Civic Knowledge Mahasiswa Melalui Model Pembelajaran Blended Learning Dengan Sistem Asynchronous: *Jurnal Civic Hukum*, 8(2).
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar Ilmu Politik*: PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.
- Fealy, G., & White, S. (2022). *Expressing Islam in New Ways: PKS and Indonesian Political Shifts*. Indonesia and the Malay World.
- Hamayotsu, K. (2018). Islam and Politics in Indonesia: The Rise of PKS and Its Challenges. *Asian Journal of Social Science*.
- Hamisa. (2020). Peran PKn dalam Membangun Sikap Demokratis dan Partisipasi Siswa. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*.
- Herdiana, D. (2020). Konstruksi Politik Identitas melalui Nilai-nilai Islam dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(2), 253-274.
- Jaya, A. (2019). Nilai-Nilai Islam dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Ditinjau dari Perspektif Komunikasi Islam: *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 3(4).
- Lavan, Y. O., Wulan Siti, S., Wiradikusumah, R. J., & Azhari, K. *Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Dinamika Politik Indonesia*.
- Liddle, R. (2020). Indonesian Democracy and the PKS: Insights on Islamic Political Parties. *Pacific Affairs*.

- Luqman, A. P. (2020). "Pendidikan Politik oleh Partai Politik Islam dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Purbalingga". (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Luth, Thohir, dkk. (2020). *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (Edisi Revisi)*. Malang: CV. OASE PUBLISHING.
- Maisyah, D. (2022). "Pandangan Al-Mawardi tentang Kewenangan Hakim dalam Hukum Tata Negara Islam (Studi Analisis Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah)". (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Mayrudin, Y. M. A., & Akbar, M. C. (2019). Pergulatan Politik Identitas Partai- Partai Politik Islam: Studi tentang PAN, PKB dan PKS. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2), 169-186.
- Mietzner, M. (2019). Indonesia's 2019 Elections: PKS and the Future of Islamic Parties. *Journal of East Asian Studies*.
- Mubarak, H. Z. (2019). "Islam Faktual: Ajaran, Pemikiran, Pendidikan, Politik Dan Terorisme (Vol. 1)". zakimu.com.
- Mufidah, N. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Nurahma & Hendriani (2021). Tinjauan Studi Kasus dalam Penelitian Psikologi. *Mediapsi*, Vol. 7, No. 2, 119–129.
- Permana, A. (2014). "Partai Politik Dan Pendidikan Politik: Studi Atas Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok Tahun 2014-2019". (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sahib, A. (2023). "Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Partai Politik: Studi Atas Keterbukaan Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik di Kota Yogyakarta". (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Serupa.id (2021). *Metode Penelitian Studi Kasus: Pengertian dan Teknik Analisis*.
- Sumanto, D., & Haryanti, A. (2021). *Pendidikan Politik*: Jakarta, Tangerang Selatan.
- Tomsa, D. (2021). Beyond Religion: The Political Transformation of PKS. *Contemporary Southeast Asia*.
- Yadi, F. D., Normansyah, A. D., & Khoerudin, C. M. (2024). Peran Kepala Desa dalam Penguatan Civic Skill pada Masyarakat Desa Wargasaluyu. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(12), 141-150.
- Yani, Y. I., Wahyudi, H., & Tarigan, M. R. I. M. A. (2020). Pembagian Ilmu Menurut Al-Ghazali (Tela'ah Buku Ihya' Ulum ad-Din). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(2).
- Naqvi, I.H., Aziz, S. and Zaidi, S.A.H. (2011). The Model of Good Governance in Islam. *African Journal of Business Management*, Vol. 5 No. 27, pp. 10984-10992.
- Hidayat, K., & Darmadi, D. (2019). *Indonesia and Two Great Narratives on Islamic Studies*.
- Halimah, L. N. (2022). Implementasi Sikap Toleransi Sebagai Nilai Pendidikan Islam Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Plural. *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 5(2), 131-141.
- Krisdiana, P. (2021). Nilai-Nilai Dakwah Islamiah, Politik Dan Toleransi Dalam Piagam Jakarta. *MUDABBIR: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(2), 154-182.